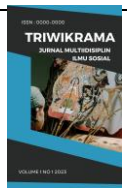
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 2, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DATA PADA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI DI KPU KOTA SERANG

Rani Muliani[1]

[123] Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2026
Revised Juni 2026
Accepted Juni 2026
Available Juni 2026

ranimuliani2018@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Pengelolaan data merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data di KPU Kota Serang telah dilaksanakan secara sistematis melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengelolaan data yang baik mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi sistem pengarsipan digital agar akses informasi internal dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi.

Kata Kunci: Manajemen Data, Administrasi Publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Teknologi Informasi

A B S T R A C T

Data management is a crucial aspect of supporting effective government administration, particularly within election management bodies. This study aims to analyze the implementation of data management within the Planning, Data, and Information Sub-division of the Serang City General Election Commission (KPU). A descriptive qualitative method was employed, utilizing observation, interviews, documentation review, and a literature study conducted during an internship. The findings indicate that data management at the Serang City KPU has been carried out systematically encompassing data collection, processing, storage, and presentation through the use of information technology. Effective data management supports transparency, accountability, and the effectiveness of decision-making in election administration. However, further optimization of the digital archiving system is still required to enable faster and more integrated access to internal information

Keywords: *Data Management, Public Administration, Serang City General Election Commission (KPU), Good Governance, Information Technology.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. Dalam konteks administrasi publik, data tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga menjadi sumber informasi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk mengelola berbagai

*Corresponding author
E-mail addresses: ranimuliani2018@gmail.com



data kepemiluan secara akurat dan terpercaya. Pengelolaan data tersebut dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi yang berperan dalam menyusun perencanaan, mengelola data kepemiluan, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan organisasi. Implementasi pengelolaan data yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan transparan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi di KPU Kota Serang.

Pengelolaan data merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan administrasi publik karena data menjadi dasar dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja organisasi. Data yang dikelola secara efektif mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama good governance sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan data dan informasi yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan data yang sistematis menjadi kebutuhan penting bagi setiap organisasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Amalina, 2025).

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong instansi pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan data dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, digitalisasi pengelolaan data dapat mempermudah proses penyimpanan (Santoso, 2025).

Rasionalisasi penelitian ini didasarkan pada hasil observasi selama kegiatan magang yang menunjukkan bahwa pengelolaan data menjadi salah satu aktivitas utama dalam mendukung operasional organisasi. Kegiatan seperti pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pengarsipan data, serta penyediaan informasi memerlukan sistem pengelolaan yang terstruktur agar informasi dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat (Musri et al., 2024). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dan informasi berbasis teknologi informasi berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi publik. Namun demikian, tantangan berupa integrasi sistem digital, pengarsipan elektronik, dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi kendala yang sering ditemui dalam pengelolaan data pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Serang menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan data di lingkungan KPU Kota Serang sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola data serta efektivitas administrasi publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyajian data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Dalam administrasi publik, pengelolaan data yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan program, serta evaluasi kinerja organisasi. Data yang dikelola secara sistematis akan menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.

Secara konseptual, pengelolaan data tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai proses strategis dalam mengelola sumber daya informasi untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pengelolaan data yang efektif harus menjamin kualitas data melalui aspek akurasi, konsistensi, kelengkapan, keamanan, dan kemudahan akses sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan Keputusan (Musri et al., 2024).

Dalam konteks administrasi publik, pengelolaan data memiliki peran yang sangat penting karena setiap kebijakan, program, maupun pelayanan publik memerlukan data yang valid dan terpercaya. Data yang berkualitas akan meningkatkan efektivitas administrasi, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pengelolaan data yang tidak terstruktur dapat menghambat proses administrasi, menimbulkan duplikasi informasi, serta mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat (Mappisabbi et al., 2024).

Seiring berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan data di instansi pemerintah mengalami transformasi melalui penerapan sistem digital dan electronic government (e-government). Digitalisasi pengelolaan data memungkinkan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Selain meningkatkan produktivitas organisasi, penerapan teknologi informasi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Santoso, 2025).

Administrasi Publik

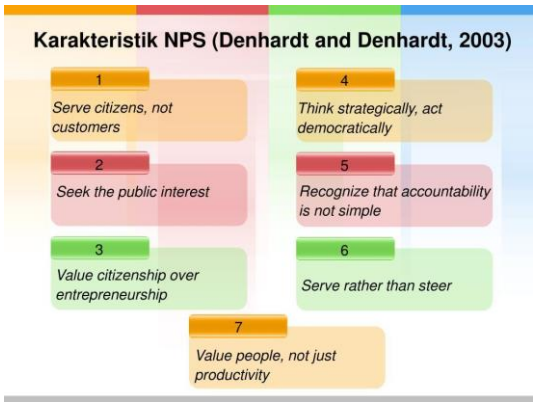
Administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut (Mulyadi, 2022), administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, informasi, dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik membutuhkan sistem informasi dan pengelolaan data yang baik guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Secara konseptual, administrasi publik merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi pemerintah mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, serta menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan akuntabel. Administrasi publik tidak hanya berfokus pada aspek birokrasi, tetapi juga memperhatikan bagaimana pemerintah mampu menciptakan nilai publik (public value) melalui penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Denhardt, J. V., & Denhardt, 2020).

Perkembangan administrasi publik menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari Old Public Administration yang menitikberatkan pada prosedur birokrasi menuju New Public Management dan New Public Service yang lebih mengedepankan efektivitas, efisiensi, partisipasi masyarakat, serta kualitas pelayanan publik. Pergeseran paradigma tersebut mendorong instansi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap proses administrasi pemerintahan.

Dalam era transformasi digital, administrasi publik juga dituntut mampu mengelola data dan informasi secara terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pengelolaan data yang sistematis akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta mendukung terwujudnya prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Musri et al., 2024).

Gambar Model *New Public Service* Oleh Denhardt & Denhardt



Sumber : *Journal of Public Administration Research and Theory (Denhardt & Denhardt, 2013).*

*Corresponding author
E-mail addresses: ranimuliani2018R

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Data

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan data di sektor publik. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Menurut (Indrajit, 2023), penerapan teknologi informasi dalam organisasi pemerintah dapat meningkatkan produktivitas kerja, kualitas pelayanan, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, digitalisasi pengelolaan data menjadi salah satu upaya yang penting dalam mendukung modernisasi administrasi publik.

Secara konseptual, teknologi informasi merupakan seperangkat perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), jaringan komunikasi, serta sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung aktivitas organisasi. Dalam konteks pemerintahan, teknologi informasi berperan sebagai instrumen strategis yang mampu meningkatkan efektivitas proses administrasi, mempercepat penyampaian informasi, serta memperkuat koordinasi antarunit kerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal (Musri et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik diwujudkan melalui penerapan electronic government (e-government). Penerapan e-government memungkinkan instansi pemerintah mengintegrasikan sistem informasi, meningkatkan kualitas pengelolaan data, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan publik. Selain itu, digitalisasi administrasi juga mampu mengurangi penggunaan dokumen fisik, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi (Mappisabbi et al., 2024).

Dalam pelaksanaan administrasi publik, penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah dapat menyediakan data yang lebih akurat, memperkuat pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi menjadi kebutuhan penting bagi setiap instansi pemerintah dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern (Santoso, 2025).

Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan data yang baik menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya good governance karena informasi yang akurat dan mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Mappisabbi et al., 2024). Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, penerapan prinsip good governance sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan penyediaan informasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara konseptual, good governance merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang demokratis, transparan, serta bertanggung jawab. Konsep ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan publik harus dilaksanakan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), good governance memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi pada konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), serta visi strategis (*strategic vision*).

Dalam administrasi publik, penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola yang baik akan mendorong organisasi publik untuk mengelola sumber daya, data, dan informasi secara profesional sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang tepat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dan sistem pengelolaan data yang terintegrasi menjadi salah satu strategi dalam mendukung implementasi good governance di era digital (Santoso, 2025).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, penerapan prinsip good governance sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi, pengelolaan data, serta penyediaan informasi kepada masyarakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan data yang sistematis akan mendukung integritas penyelenggaraan pemilu, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Mappisabbi et al., 2024).

Peran Pengelolaan Data di KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap data dan informasi yang akurat. Pengelolaan data yang baik akan mendukung pelaksanaan perencanaan program, penyusunan laporan, pengarsipan dokumen, serta penyediaan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa data yang digunakan oleh organisasi telah dikelola secara efektif sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas (Karlina et al., 2025).

Secara kelembagaan, KPU merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam menjalankan tugasnya, KPU tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu, tetapi juga berkewajiban mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara profesional, akurat, dan transparan. Pengelolaan data yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemilu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil (Amalina, 2025).

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan penyusunan program kerja, pengelolaan data kepemiluan, penyusunan laporan, pengarsipan dokumen, serta penyediaan informasi bagi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi. Pengelolaan data yang dilakukan secara sistematis memungkinkan setiap informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan validitas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan data di lingkungan KPU juga diarahkan pada penerapan sistem digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi serta kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran data dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan aman. Dengan demikian, pengelolaan data yang baik tidak hanya mendukung kelancaran administrasi internal, tetapi juga menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Musri., 2024).

2. METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

*Corresponding author
E-mail addresses: ranimuliani2018R

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan pengalaman selama pelaksanaan kegiatan magang. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pengungkapan fakta, proses kerja, serta berbagai fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan data dalam lingkungan organisasi publik. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai pelaksanaan pengelolaan data di KPU Kota Serang. Pemilihan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada karakteristik penelitian yang berupaya memahami aktivitas administrasi dan pengelolaan informasi dalam konteks organisasi.

Menurut penelitian (Musri., 2024), pendekatan deskriptif kualitatif efektif digunakan untuk menganalisis implementasi sistem berbasis teknologi informasi dalam organisasi publik karena mampu menggambarkan proses, hambatan, serta dampak yang muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian (Firdaus & Yuningsih, 2025), menunjukkan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan sistem informasi pemerintahan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung pada instansi pemerintah. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Serang, termasuk faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi di lingkungan organisasi.

2. Ruang Lingkup dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang KPU Kota Serang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Penelitian difokuskan pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi yang memiliki tugas dalam pengelolaan data, penyusunan perencanaan program, pengolahan informasi, penyusunan laporan, serta pengarsipan dokumen yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Subbagian ini memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja organisasi.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kesesuaian antara fokus penelitian dengan aktivitas yang dilaksanakan pada unit kerja tersebut. Selama kegiatan magang, peneliti terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan administrasi dan pengelolaan data, seperti pengecekan laporan anggaran, penyusunan dokumen perencanaan, pengarsipan dokumen, serta pendistribusian surat kepada divisi terkait. Keterlibatan langsung tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai implementasi pengelolaan data di lingkungan KPU Kota Serang.

Penelitian dilaksanakan selama periode magang yang berlangsung pada bulan Mei hingga Juni 2025. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti melakukan observasi terhadap proses kerja, pengelolaan dokumen, serta sistem administrasi yang diterapkan pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengelolaan data di KPU Kota Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan mengenai implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi di KPU Kota Serang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi, dan studi literatur.

Data yang digunakan mencakup:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas kerja yang berkaitan dengan pengelolaan data selama pelaksanaan magang di KPU Kota Serang. Melalui observasi, peneliti memperoleh informasi mengenai proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



penyajian data yang dilakukan oleh Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap penggunaan teknologi informasi, sistem administrasi, serta mekanisme koordinasi antarbagian dalam mendukung pengelolaan data organisasi.

Teknik observasi dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan melakukan pengamatan secara langsung, peneliti dapat memahami proses kerja serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan data dalam organisasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan data di KPU Kota Serang. Dokumen yang digunakan meliputi laporan kegiatan, laporan anggaran, dokumen perencanaan, arsip surat menyurat, notulen rapat, serta berbagai dokumen administratif lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data hasil observasi sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dokumentasi juga membantu peneliti dalam memahami sistem administrasi dan tata kelola data yang diterapkan oleh KPU Kota Serang.

c. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan data, administrasi publik, teknologi informasi, dan good governance. Studi literatur digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis hasil penelitian serta membandingkan kondisi yang ditemukan di lapangan dengan konsep dan teori yang telah dikembangkan oleh para ahli.

Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pengelolaan data dalam mendukung efektivitas administrasi publik serta penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.

4. Pembahasan dan Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Model ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti melalui proses analisis yang dilakukan secara berkelanjutan sejak data dikumpulkan hingga penelitian selesai. Analisis data dilakukan untuk menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur terkait implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi di KPU Kota Serang. Model analisis ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, dan pengelompokan data yang diperoleh selama penelitian. Menurut(Qomaruddin & Sa'diyah, 2024), Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil observasi dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema tertentu, seperti proses pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, penyajian informasi, serta faktor pendukung dan hambatan dalam pengelolaan data. Tujuan reduksi data adalah mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah terkumpul dan memfokuskan analisis pada informasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses menyusun dan menampilkan data secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami informasi yang diperoleh. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif yang

*Corresponding author
E-mail addresses: ranimuliani2018R

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

menggambarkan implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Serang. Penyajian data yang terstruktur membantu peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, serta berbagai fenomena yang muncul selama penelitian berlangsung

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi makna, pola, dan hubungan antar data untuk menjawab rumusan masalah penelitian(Sari et al., 2022). Selanjutnya, dilakukan verifikasi dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi, dan sumber literatur yang digunakan sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang baik. Proses verifikasi dilakukan secara berulang selama penelitian agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu reduksi data, kategorisasi tema, analisis perbandingan literatur, dan interpretasi temuan lintas wilayah.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Data dari jurnal, laporan DJP, publikasi BPS, serta temuan penelitian terdahulu disortir untuk memastikan hanya informasi yang relevan dengan variabel kesadaran dan kepatuhan yang digunakan. Tahap ini krusial sebab jumlah literatur mengenai kepatuhan perpajakan cukup besar dan perlu dipilah secara sistematis.

Tahap kedua adalah kategorisasi tema, yakni proses mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti pengetahuan perpajakan, kualitas layanan fiskus, persepsi wajib pajak, edukasi, dan dampaknya terhadap kepatuhan. Proses kategorisasi ini didasarkan pada pola yang muncul dari berbagai penelitian, misalnya temuan bahwa edukasi perpajakan di Mamuju meningkatkan kesadaran masyarakat secara signifikan.

Tahap ketiga adalah analisis perbandingan literatur, yaitu membandingkan temuan antar daerah untuk melihat konsistensi maupun variasi pola hubungan antara kesadaran dan kepatuhan. Misalnya, penelitian di Palembang menemukan bahwa persepsi masyarakat dan kualitas layanan fiskus memengaruhi kepatuhan (Subhan Widiansyah et al., 2023), sedangkan penelitian di Ternate memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan berperan besar dalam menentukan kepatuhan. Analisis komparatif ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai apakah pola tersebut juga berlaku di Kota Serang.

Tahap terakhir adalah interpretasi temuan lintas wilayah yang disesuaikan dengan konteks Kota Serang. Interpretasi ini tidak hanya mempertimbangkan variabel psikologis dan edukatif, tetapi juga karakter sosial dan administratif Kota Serang sebagai wilayah urban. Pendekatan interpretatif ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana kesadaran wajib pajak dapat membentuk perilaku kepatuhan di tingkat lokal serta bagaimana kebijakan dapat diarahkan untuk memperkuat voluntary compliance.

6. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KPU Kota Serang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki tugas melaksanakan seluruh tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, jujur, adil, transparan, serta akuntabel. Dalam menjalankan tugas tersebut, KPU Kota Serang didukung oleh beberapa subbagian yang memiliki fungsi dan tanggung jawab berbeda, salah satunya adalah Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi organisasi, khususnya dalam penyusunan perencanaan program, pengelolaan data kepemiluan, penyusunan laporan kinerja, pengarsipan dokumen, serta penyediaan informasi bagi kebutuhan internal maupun eksternal organisasi. Pengelolaan data yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan sehingga mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas organisasi. Menurut (Musri., 2024), pemanfaatan sistem informasi dalam administrasi pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas organisasi, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Implementasi Pengelolaan Data

Implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Serang dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, yaitu menghimpun data dari setiap divisi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, pelaksanaan program, administrasi keuangan, serta penyelenggaraan pemilu. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam penyusunan berbagai dokumen administrasi maupun laporan organisasi.

Tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pada tahap ini dilakukan proses verifikasi, klasifikasi, serta penyusunan data agar informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan validitas yang tinggi. Pengolahan data yang baik akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan organisasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mappisabbi, Haris, dan Zuhri (2024) yang menyatakan bahwa pengelolaan data yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Selanjutnya adalah penyimpanan data, yaitu proses pengarsipan dokumen baik dalam bentuk fisik maupun digital. Pengarsipan dilakukan secara sistematis agar data mudah ditemukan kembali ketika diperlukan serta mampu menjaga keamanan dan keberlanjutan informasi organisasi. Setelah data tersimpan, tahapan terakhir adalah penyajian informasi. Informasi yang telah diolah disajikan dalam bentuk laporan, dokumen perencanaan, bahan rapat, maupun informasi publik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan organisasi dan pengambilan keputusan.

Faktor Pendukung dan Hambatan

Pelaksanaan pengelolaan data di KPU Kota Serang didukung oleh beberapa faktor, antara lain tersedianya perangkat teknologi informasi, adanya pegawai yang kooperatif, serta sistem kerja yang telah tersusun dengan baik. Faktor-faktor tersebut mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian data sehingga pelaksanaan administrasi dapat berjalan secara efektif.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti sistem pengarsipan digital yang belum sepenuhnya terintegrasi, jumlah dokumen yang cukup banyak sehingga membutuhkan waktu dalam proses pengelolaan, serta perbedaan format data yang berasal dari masing-masing divisi. Hambatan tersebut berpotensi memengaruhi efisiensi pengelolaan data apabila tidak didukung dengan standardisasi format data dan sistem informasi yang terintegrasi. (Musri., 2024), menjelaskan bahwa integrasi sistem informasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan di era digital.

Analisis Berdasarkan Perspektif Administrasi Publik

Berdasarkan perspektif administrasi publik, implementasi pengelolaan data di KPU Kota Serang telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Penggunaan teknologi informasi membantu mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah penyediaan informasi bagi pimpinan maupun masyarakat.

Dari perspektif teori administrasi publik, pengelolaan data yang dilakukan oleh Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi menunjukkan bahwa data merupakan sumber daya strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi organisasi. Pengelolaan data yang sistematis menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

*Corresponding author
E-mail addresses: ranimuliani2018R



keputusan yang lebih tepat. Hal tersebut sejalan dengan konsep good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Mappisabbi et al., 2024).

3. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi pengelolaan data pada Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Serang telah berjalan melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data secara sistematis sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setiap tahapan dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan validitas yang tinggi sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas administrasi serta proses pengambilan keputusan. Pengelolaan data yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja organisasi, tetapi juga menghasilkan informasi yang berkualitas sebagai dasar dalam penyusunan program, penyusunan laporan, monitoring, dan evaluasi kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan data mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan informasi yang lebih mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan (Musri., 2024)). Selain itu, implementasi pengelolaan data berbasis teknologi informasi juga mendukung penerapan prinsip *good governance* karena mendorong keterbukaan informasi, efektivitas pelayanan, dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi publik (Mappisabbi et al., 2024).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi data pada subbagian perencanaan, data, dan informasi di KPU Kota Serang, terdapat bebrapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi di linkungan organisasi sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarbagian dalam proses pengelolaan data agar informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu.

b. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi digital untuk mendukung proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data.

c. Melaksanakan pelatihan atau pengembangan kompetensi secara berkala bagi pegawai agar memiliki kemampuan yang memadai dalam pengelolaan data dan penggunaan aplikasi pendukung.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



4. DAFTAR PUSTAKA

Amalina, N. (2025). Efektivitas Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia _ FORMULA Jurnal Administrasi Publik.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2020). The New Public Service: Serving. *Not Steering (4th Ed.). Routledge*.

Firdaus, N. A., & Yuningsih, N. Y. (2025). Penerapan E-Government melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lebak Tahun 2024 _ Transparansi _ Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi.

Indrajit, R. E. (2023). Electronic Government. Retrieved from https://eko-indrajit.com?

Karlina, B., Syamsir, Syamsir, Putri, H. N. N., Hayati, I., Ulya, I., Sari, V. M., Dani, G. S. W., & Marsa, T. F. (2025). Implementasi Governansi Digital di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat_ Strategi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Informasi Publik _ Jurnal Pendidikan Tambusai.

Mappisabbi, F., Haris, A., & Zuhri, W. (2024). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Era Digital _ Sosial Simbiosis _ Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik.

Mulyadi, D. (2022). Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik.

Musri, M., Pasaribu, F. R., Khudri, N., Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). mplementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Negara. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. Retrieved from https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.30320

Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif_ Perspektif Spradley, Miles dan Huberman _ Journal of Management, Accounting, and Administration.

Santoso, I. A. P. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan _ Indonesian Journal of Public Administration Review.

Sari, F. D. N., Wardiani, R., & Setiawan, H. (2022). ANALISIS TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM TALKSHOW TONIGHT SHOW (MARET 2021) _ Jurnal Bahasa dan Sastra.

Subhan Widiansyah, Tri Ambarwati, Syifa Amalia, Dede Annisa Fauziah, Mahmudah Mahmudah, A. F. (2023). Antisipasi Kenakalan Remaja Melalui Sosialisasi Pencegahan Perilaku Menyimpang di SMAN 3 Kota Serang. *Journal Of Social Science Research*. Retrieved from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+contoh+kasus+bullying+di+sma+serang+dan+pelaku+yg+membully+nya&btnG=#d=gs_qabs&t=1759999195718&u=%23p%3D35emq1DncjMJ

*Corresponding author
E-mail addresses: ranimuliani2018R